

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses menaikkan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari total keseluruhan pendapatan nasional disuatu negara dari satu tahun ketahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan barang dan jasa dalam masyarakat tanpa memandang apakah pertumbuhan ekonomi itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia terus bertambah. Oleh karena itu ada kalanya perekonomian di sebuah negara mengalami pertumbuhan secara terus-menerus dan ada pula mengalami perubahan dalam hal ini yaitu penurunan. Pada dasarnya setiap pemerintahan di dunia (termasuk pemerintahan di Indonesia) selalu bertujuan mengembangkan perekonomiannya sedemikian rupa sehingga taraf hidup bangsa yang bersangkutan meningkat.

Kegiatan ekonomi diselenggarakan oleh negara dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Kesejahteraan suatu negara bisa dicapai apabila ekonomi negara mencapai pertumbuhan. Menurut Sadono Sukirno, ada dua sebab yang mengharuskan sebuah negara harus mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu untuk menciptakan lapangan pekerja untuk penduduknya yang

setiap saat bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat.¹ Pada sumber yang berbeda, Sadono Sukirno juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Maka pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.² Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jika pertumbuhan ekonomi suatu negara turun maka kegiatan produksi juga akan menurun.

Pada umumnya pendekatan yang sering digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah melalui peningkatan *output agregat* (barang dan jasa) atau sering disebut dengan *produk domestik bruto* (PDB). Dalam hal ini pemerintah sebagai regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Sedangkan kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro ekonomi*, Edisi ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 25

² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2004), h. 448-452

menahan inflasi mencapai pekerjaan penuh. Dalam kebijakan moneter pemerintah dapat mengendalikan inflasi, sedangkan dalam kebijakan fiskal adalah mengambil kebijakan makro untuk melihat aktivitas belanja pemerintah. Berikut dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2004-2016

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2004	5,0
2	2005	5,7
3	2006	5,5
4	2007	6,4
5	2008	6,0
6	2009	4,6
7	2010	6,4
8	2011	6,2
9	2012	6,0
10	2013	5,6
11	2014	5,0
12	2015	5,4
13	2016	5,0

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004-2016 pergerakan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004 sebesar 5,0% dan tahun 2005 sebesar 5,7%. Namun pada tahun 2006 turun sebesar 5,5%. Kemudian pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi kembali naik sebesar 6,4%. Namun pada tahun 2008-2009 pertumbuhan ekonomi kembali turun dimana pada tahun 2008 sebesar 6,0%. Pada tahun 2009 sebesar 4,6%. Namun pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kembali naik sebesar 6,4%. Kemudian pada tahun 2011-2014 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan

dimana pada tahun 2011 sebesar 6,2%, pada tahun 2012 sebesar 6,0%, pada tahun 2013 sebesar 5,6%, pada tahun 2014 sebesar 5,0%, dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kembali naik sebesar 5,4%. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 5,0%.

Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan karena pada saat itu terjadi efek perekonomian global dan pemangkasan anggaran juga menjadi penganjal pertumbuhan yang menjatuhkan pertumbuhan ekonomi. Pelemahan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh pola musiman belanja pemerintah diawal tahun yang masih relatif terbatas. Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (*wait and see*) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi ditengah upaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah.³

Menurut Todaro dalam Amin Pujiati, terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital kemajuan teknologi.⁴ Penerapan Otonomi Daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena hal tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan keuangan daerahnya sendiri serta membuat kebijakan yang mampu mempengaruhi kemajuan daerahnya.

³ Blogspot.com, *penyebab pertumbuhan ekonomi naik turun*, 4/5/2016 jam 22.50

⁴ Amin Pujiati, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kareasidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (2007), h. 5

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi, dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.⁵ Dalam sebuah negara, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari pembangunan ekonomi.

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Kegiatan ini dikenal dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal, moneter, dan agama.⁶

Menurut Prawisetoto dalam Amin Pujiati, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).⁷

⁵ Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

⁶ Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.h 17

⁷ *Ibid.*, h. 5-6

Menurut Oates dalam Hadi Sasana, desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Desentralisasi fiskal akan menyebabkan meningkatnya efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.⁸ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa disentralisasi fiskal ini dapat dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat daerahnya.

Sumber penerimaan daerah dalam desentralisasi fiskal selain dari pendapatan asli daerah bisa dilihat dari dana perimbangan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi umum (DAU), dan Dana alokasi khusus (DAK).

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (SDA), sedangkan Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat terjamin. Sedangkan Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN kepada daerah

⁸ Hadi Sasana, "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Vol.10 No.1 Juni, 2009), h. 106-07

tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional.

Dapat disimpulkan bahwa selain dari sisi pengeluaran, implikasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi penerimaan juga penting untuk dilihat. Dana perimbangan merupakan sisi penerimaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Adapun realisasi dana perimbangan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK)
Tahun 2004-2016

No	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)
1	2004	122.867.684.672.742
2	2005	143.221.256.566.482
3	2006	222.130.617.897.611
4	2007	243.967.173.165.971
5	2008	278.714.658.866.600
6	2009	287.751.462.978.937
7	2010	316.711.293.029.068
8	2011	347.246.213.954.316
9	2012	411.293.124.979.761
10	2013	430.354.730.161.983
11	2014	477.052.754.641.271
12	2015	485.818.463.746.730
13	2016	639.765.656.796.490

Sumber: *Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, bahwa perkembangan realisasi dana perimbangan dari tahun 2004-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana realisasi dana perimbangan Indonesia pada tahun 2004 sebesar Rp.122.867.684.672.742 terus meningkat hingga pada tahun 2016 realisasi dana perimbangan sebesar Rp.639.765.656.796.490.

Selain dana perimbangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun inflasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, inflasi akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tingkat inflasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh negatif tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.⁹ Adapun perkembangan inflasi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3.
Perkembangan Inflasi Tahun 2004-2016

No	Tahun	Inflasi (%)
1	2004	6,4
2	2005	17,1
3	2006	6,6
4	2007	7,4
5	2008	11,1
6	2009	2,8
7	2010	7,0
8	2011	3,8
9	2012	4,3
10	2013	8,4
11	2014	8,4
12	2015	3,4
13	2016	3,0

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia (SEKI) Tahun 2004-2016

⁹ Muchdie M. Syarun, "Inflasi, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Volume 7, Nomor 2, September 2016, h. 35

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi di Indonesia selama periode 2004-2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana selama 13 tahun tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,8%, hal ini disebabkan adanya deflasi terhadap barang-barang yang harganya ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu tidak adanya kebijakan kenaikan harga pada tahun tersebut sehingga harga-harga barang menjadi turun. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 17%. Dimana pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga semua kelompok jenis barang dan jasa seperti kelompok bahan makanan dan lain-lain.

Inflasi mengalami penurunan pada tahun 2004-2016 hal ini disebabkan adanya deflasi terhadap barang-barang yang harganya ditetapkan oleh pemerintah seperti harga subsidi BBM, harga sembako, dan barang industri. pada tahun 2004-2016 rendahnya inflasi tersebut terjadi karena salahsatu penyumbang inflasi terbesar, yakni subsidi BBM telah dihapuskan sejak tahun 2014.¹⁰

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti berbagai aspek yang berkenaan dengan fenomena di atas, serta mengetahui lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Dana Perimbangan dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”**.

¹⁰ <https://m.cnnindonesia.com>ekonomi> di akses 31 januari 2018 , 03:32 AM

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
2. Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital kemajuan teknologi.
3. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi, dengan mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.
4. Selain dana perimbangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun inflasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, inflasi akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tingkat inflasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh negatif tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dinyatakan di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu pada pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004-2016. Penulis membatasi variabel yang diduga erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu dana perimbangan dan inflasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh dana perimbangan dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Bagaimana pengaruh dana perimbangan dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat di jadikan bahan perbandingan terhadap penelitian terdahulu ataupun yang sejenisnya, karena penelitian tersebut menggunakan ruang, metode dan waktu yang berbeda-beda, sehingga dapat di jadikan sebagai bahan pembelajaran.

3. Bahan pembaca dan pengembangan penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber referensi dan tambahan pengetahuan dan kerangka pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis dan dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya skripsi ini dan tersusun secara sistematis maka diurutkan berdasarkan bab-bab dan beberapa sub bab. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan tentang kerangka konseptual yang penulis lakukan.

BAB III : Metodologi Penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian terkait dengan tema yang telah ditentukan.

BAB IV : Hasil Penelitian, pada bab ini akan disajikan dan dianalisa terhadap data-data yang ada serta konsep-konsep yang ditemukan dari analisis data tersebut.

BAB V : Penutup, dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai penutup skripsi sehingga pembaca dapat melihat inti dari isi skripsi ini. Dalam bab ini juga diberi saran penting berdasarkan pada penelitian yang dilakukan untuk pihak terkait.

UIN IMAM BONJOL
PADANG